

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Militer Indonesia merupakan kasus yang menarik bagi studi mengenai Militer dan Politik. Selain keterlibatan dalam sejarah kemerdekaan, selama tiga dekade militer Indonesia juga menjadi kekuatan politik utama dibawah rezim Orde Baru. Studi-studi terdahulu telah melihat militer dalam berbagai masa, dari era penjajahan (cikal bakal), pascakemerdekaan atau Orde Lama, Orde Baru, hingga masa transisi demokrasi. Beberapa ahli, misalnya Samuel Decalo, Eric Nordlinger, Ulf Sundhaussen, Samuel Huntington, Harold Crouch, dan S.B. Yudhoyono, juga turut memberi pandangan perihal keterlibatan militer dalam politik, yang akarnya adalah kekuatan politik militer.

Dalam penelitian ini, untuk sampai kepada fokus penelitian, yaitu ketahanan kekuatan politik pasca Orde Baru di Indonesia, saya mengombinasikan bahasan-bahasan penelitian terdahulu tersebut untuk menganalisis fenomena yang terjadi pasca Orde Baru. Hal ini juga yang kemudian menjadi perbedaan fundamen antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Studi ini juga menjadi kajian yang menarik, mengingat pascareformasi kita mulai memasuki era demokrasi. Sementara, militer menjadi pilar dalam rezim otoritarian Orde Baru. Tidak sampai disana, Dwi Fungsi ABRI, hak politik militer, dan fraksi ABRI di parlemen juga dihapus. Namun, pasca Orde Baru militer masih menjadi kekuatan politik, meskipun tidak kekuatan utama seperti halnya ketika Orde Baru dulu. Desain kekuatan politik militer kemudian direlevansikan dengan situasi demokrasi kini.

Saya memulai penelitian dengan pertanyaan mengapa militer masih menjadi kekuatan politik pasca Orde Baru di Indonesia. Mempelajari literatur-literatur tentang sejarah TNI menjadi langkah awal yang saya lakukan. Dilanjutkan dengan wawancara pihak-pihak yang terlibat maupun pihak yang memiliki kepakaran dalam bidang militer dan politik. Setelah itu, saya menggabungkan dengan fenomena kontemporer serta teori-teori yang relevan. Langkah-langkah inilah yang kemudian melahirkan pandangan baru dalam menjawab pertanyaan penelitian. Terjawabnya pertanyaan penelitian, bersifat serta merta dengan lahirnya cara pandang baru dalam melihat fenomena kekuatan politik militer pasca Orde Baru.

Penemuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa beberapa hipotesis yang telah dianjurkan dalam literatur terdahulu, serta pandangan beberapa ahli, tidak relevan lagi dalam melihat fenomena kekuatan politik militer pasca Orde Baru. Ketidakrelevan ini bukan dalam arti temuan penelitian ini mematahkan pendapat ahli ataupun menyalahkannya. Namun, dalam artian temuan penelitian ini menjadi cara pandang baru untuk melihat kekuatan politik pasca Orde Baru, dan mampu menjelaskannya. Pendapat ahli tersebut tidak relevan untuk melihat kekuatan politik militer dimasa ini, karena perubahan dinamika yang signifikan pasca Orde Baru. Artinya, data dan observasi empirik pasca Orde Baru menunjukkan hal yang berbeda. Berdasarkan proposisi yang telah ditetapkan dalam bab I skripsi ini, ada beberapa penemuan kunci: *pertama*, kekuatan politik militer memiliki dimensi ketahanannya, sehingga menjadi kokoh.

Dalam penelitian ini, terdapat analisis dan pemetaan mengenai bangunan kekuatan politik Militer, yang dipetakan dalam bentuk bangunan Piramida. Kekuatan politik militer bisa diibaratkan dengan konstruksi Piramida Kekuatan Politik Militer. Piramida ini terdiri dari fondasi utama atau pilarnya, kemudian struktur tengah, dan puncaknya ibarat Puncak Gunung Es. Puncak gunung es ini merupakan tampilan yang tampak dalam kekuatan politik militer pasca-Orde Baru. Puncak tersebut hanyalah tampilan dari luar, karena strukturnya masih ada dua lapis dibawahnya.

*Kedua*, kekuatan politik militer pasca Orde Baru tidak lahir dari senjata, keterlibatan politik praktis ataupun cara-cara pretorial. Namun, kekuatan militer dalam politik telah terbangun sejak masa perjuangan, dan membentuk semacam bangunan yang kokoh. *Ketiga*, dengan andil perjuangan dan kepemilikan cara pandang tersendiri, militer Indonesia kemudian memiliki cara tersendiri dalam melihat dan menjaga stabilitas negara Indonesia.

*Keempat*, militer Indonesia bukan alat negara yang bersifat “mati” dalam kehidupan bernegara. Meskipun militer merupakan alat pertahanan negara yang berpolitik sesuai dengan keputusan politik negara, namun dengan kekuatan politik tersebut militer tidak menjadi “alat mati” dalam negara. TNI juga terlibat dalam pembuatan kebijakan pertahanan, dan beberapa *MoU* dengan institusi sipil lainnya.

Dengan temuan-temuan demikian, tidak heran apabila militer tetap menjadi salah satu kekuatan politik di Indonesia pasca Orde Baru. Meskipun penghapusan hak politik, Dwi Fungsi, dan Fraksi ABRI dilaksanakan pasca Orde Baru. Inilah

yang membuat militer Indonesia memiliki ketahanan dalam kekuatan politiknya. Ketahanan kekuatan politik tersebut tidak muncul layaknya seperti ketika posisi militer saat Orde Baru.

Lebih lanjut, temuan ini tidak pula bersifat mutlak. Meskipun melahirkan pandangan baru, yang berguna untuk memperkaya khasanah kajian militer dan politik di Indonesia, tidak menutup kemungkinan munculnya penelitian berikutnya yang menjadi antitesis dari temuan ini. Studi ini akan terus berkembang dan menjadi pembahasan yang akan selalu memiliki daya tarik berbeda dari studi-studi lainnya.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Untuk Pemerintahan Sipil**

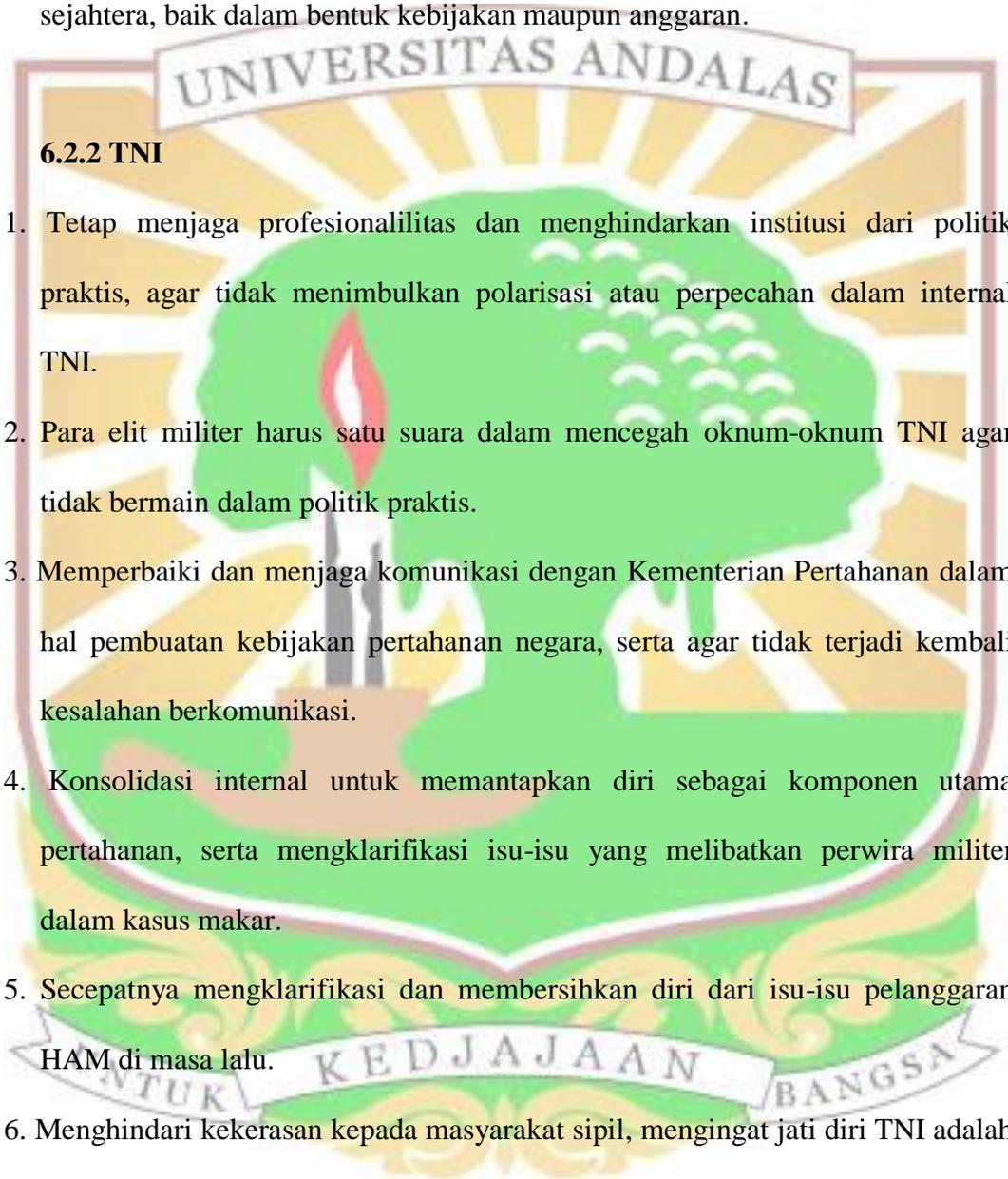
1. Pemerintahan sipil harus mampu menciptakan dan menjamin terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan. Kondisi-kondisi seperti ini sangat penting dalam menjamin kepentingan nasional, dan terhindar dari intervensi asing. Ketika asing sudah mengintervensi, imbasnya adalah kedaulatan negara. Jangan sampai keadaan demikian tidak tercipta, karena implikasinya adalah turun tangannya militer dalam menghadirkan stabilitas politik dan pemerintahan negara.
2. Menjamin kehidupan bernegara yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.
3. Mengupayakan pemerataan pembangunan, terutama untuk daerah atau pulau terluar, terpencil, dan terbelakang. Jangan sampai daerah-daerah tersebut tidak

merasa menjadi bagian NKRI, karena imbasnya adalah terancamnya keutuhan NKRI.

4. Mendukung terciptanya militer Indonesia yang profesional, kuat, mandiri, dan sejahtera, baik dalam bentuk kebijakan maupun anggaran.

### 6.2.2 TNI

1. Tetap menjaga profesionalitas dan menghindari institusi dari politik praktis, agar tidak menimbulkan polarisasi atau perpecahan dalam internal TNI.
2. Para elit militer harus satu suara dalam mencegah oknum-oknum TNI agar tidak bermain dalam politik praktis.
3. Memperbaiki dan menjaga komunikasi dengan Kementerian Pertahanan dalam hal pembuatan kebijakan pertahanan negara, serta agar tidak terjadi kembali kesalahan berkomunikasi.
4. Konsolidasi internal untuk memantapkan diri sebagai komponen utama pertahanan, serta mengklarifikasi isu-isu yang melibatkan perwira militer dalam kasus makar.
5. Secepatnya mengklarifikasi dan membersihkan diri dari isu-isu pelanggaran HAM di masa lalu.
6. Menghindari kekerasan kepada masyarakat sipil, mengingat jati diri TNI adalah tentara rakyat.



### 6.2.3 Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Menganalisis perihal keterkaitan kesejahteraan prajurit TNI dengan profesionalitas militer.
2. Meneliti dan mengikuti perihal perkembangan wacana pengembalian hak politik TNI.
3. Mengembangkan pola relasi sipil-militer pasca Orde Baru.
4. Menelaah pengaruh Teritorial TNI dalam setiap gelaran Pilkada.

